



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Membangun Perdamaian Bangsamoro yang

Berkelanjutan di Filipina Selatan

Skripsi

Oleh:

Kelysha Feodora Amanda

6091801184

Bandung

2023



Parahyangan Catholic University

Faculty of Social and Political Sciences

Undergraduate International Relations Study Program

Excellent Accredited

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Building Bangsamoro Sustainable Peace in the Southern
Philippines**

Undergraduate Thesis

By:

Kelysha Feodora Amanda

6091801184

Supervisor

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kelysha Feodora Amanda S
Nomor Pokok : 6091801184
Judul : Membangun Perdamaian Bangsamoro yang Berkelanjutan di Filipina Selatan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 24 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc : 


Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. : 

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han) : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelysha Feodora Amanda

NPM : 6091801184

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan pada Bangsamoro di Filipina Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 31 Desember 2022



Kelysha Feodora Amanda S

6091801184

ABSTRAK

Nama : Kelysha Feodora Amanda S
NPM : 6091801184
Judul : Membangun Perdamaian Bangsamoro yang Berkelanjutan di Filipina Selatan

Moro merasakan diskriminasi dan marjinalisasi secara struktural. Konflik dan kekerasan yang berlarut-larut antara Moro dan Pemerintah Filipina telah berjalan selama empat abad. Kelompok-kelompok pemberontak terutama MILF menyuarakan *self-determination* dan pemisahan diri. Upaya Pemerintah Filipina untuk menjaga integritas teritorialnya dengan melakukan perjanjian perdamaian Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) bersama dengan MILF yang dimediasi oleh Malaysia. Maka dari itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimanakah pembangunan perdamaian Bangsamoro pasca Comprehensive Agreement on the Bangsamoro?”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya pembangunan perdamaian Bangsamoro setelah penandatanganan perjanjian damai *The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Level of Leadership* Lederach berfungsi sebagai lensa untuk melihat pada aktor dan aktivitas pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Namun, setelah CAB masih terdapat residu konflik dan kekerasan. Residu ini dikarenakan perdamaian di Mindanao tidak semudah menandatangani perjanjian damai antara MILF dan Pemerintah Filipina. Perdamaian yang berkelanjutan kelompok Bangsamoro memerlukan pendekatan dari berbagai aktor untuk menangani sisa konflik dan mewujudkan aktivitas damai sesuai dengan kemampuannya. Perdamaian ditunjang oleh kekuatan rakyat dan *gatekeepers* di celah horizontal, vertikal, dan diagonal. Perdamaian yang terkolaboratif antar aktor ini memberikan keseimbangan dan harmoni di Filipina yang lebih besar. Melalui tekad yang kuat dan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat Filipina bergerak menuju perdamaian yang berkelanjutan

Kata Kunci : MILF, Pemerintah Filipina, *The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro*, *Level of Leadership*, Pembangunan perdamaian.

ABSTRACT

Name : Kelysha Feodora Amanda S
Student ID : 6091801184
Title : *Building Bangsamoro Sustainable Peace in the Southern Philippines*

*Moro experience constant discrimination and marginalization structurally. The protracted conflict and violence between the Moro and the Government of the Philippines has been going on for four centuries. The rebel groups, especially the MILF, voiced self-determination and secession. The efforts of the Philippine Government to maintain its territorial integrity by entering into a Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) peace agreement with the MILF mediated by Malaysia. Therefore, this study will answer the research question "**How is the Bangsamoro peace building after the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro?**" This study aims to analyze the efforts to build peace at the Bangsamoro after the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro peace agreement. The Level of Leadership Lederach serves as a lens through which to look at sustainable peace building actors and activities. However, after CAB there is still a residue of conflict and violence. This residue is because peace in Mindanao is not as easy as signing a peace agreement between the MILF and the Government of the Philippines. The sustainable peace of the Bangsamoro group requires approaches from various actors to deal with residual conflicts and carry out peaceful activities according to their abilities. Peace is supported by people power and gatekeepers in the horizontal, vertical and diagonal gaps. Collaborative peace between these actors provides balance and harmony in the greater Philippines. Through strong determination and contributions from all walks of life the Philippines is moving towards a sustainable peace.*

Keywords : MILF, Government of the Philippines, The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, Level of Leadership, Peacebuilding

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan studinya dengan skripsi yang berjudul “Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan pada Bangsamoro di Filipina Selatan.” Penulisan akademik ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini diteliti untuk melihat perdamaian yang inklusif dari seluruh lapisan di Filipina melakukan upaya pembangunan perdamaian Bangsamoro. Saya berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai perdamaian berkelanjutan di Filipina Selatan yang memerlukan usaha dan kemauan dari komunitas lokal, masyarakat sipil, dan elit politik. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis meminta maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan.

Bandung, 31 Desember 2022

Kelysha Feodora Amanda S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan masalah.....	11
1.2.3 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Tinjauan Pustaka	13
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data	27
1.6.1 Metode Penelitian.....	27
1.6.2 Teknik Pengumpulan data	27
1.7 Sistematika Pembahasan	28
BAB II PERDAMAIAN, KONFLIK, DAN KEKERASAN DI TANAH MINDANAO	30
2.1 Dinamika Konflik Moro	30
2.2 Perdamaian di Filipina Selatan Berdasarkan The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro	34

2.2.1	Pemerintah Filipina-MILF Mengakhiri Konflik Bersenjata melalui Perjanjian Damai <i>The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro</i>	34
2.2.2	Kondisi Perdamaian Pasca Penandatanganan The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro.....	38
2.3	Proses Perdamaian Era Pemerintahan Pemerintahan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte	41
BAB III MEMBANGUN PERDAMAIAN BANGSAMORO		44
3.1	Upaya MILF dan Pemerintah Filipina dalam Membangun Perdamaian Bangsamoro	45
3.2	Pemimpin <i>Middle-Level</i> Bangsamoro dalam Membangun Hubungan yang Transformatif	51
3.2.1	MILF Sebagai Aktor <i>Hybrid Middle-Range</i> Menangani Celah Vertikal dan Horizontal	51
3.2.2	Bangsamoro Development Agency (BDA) <i>Gatekeepers</i> Intervensi Asing untuk Menyokong Perdamaian di Mindanao....	55
3.3	Transformasi Konflik Menggunakan Kekuatan Rakyat (<i>People Power</i>).....	57
3.4	Perdamaian Bangsamoro yang Terkolaboratif	60
BAB IV KESIMPULAN		64
DAFTAR PUSTAKA		68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Galtung's The Conflict Triangle (Galtung's 1996)	18
Gambar 1.2 Galtung's Concepts of Violence and Peace (Galtung's 1969)	20
Gambar 1.3 Lederach's Pyramid (Lederach's 1997)	24
Gambar 3.1 Gambaran penulis dalam perdamaian Bangsamoro yang terkolaboratif.....	61

DAFTAR SINGKATAN

AFP	Armed Forces of the Philippines
ARMM	Autonomous Region in Muslim Mindanao
ASG	Abu Sayyaf Group
BARMM	Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
BBL	Bangsamoro Basic Law
BDA	Bangsamoro Development Agency
BIAF	Bangsamoro Islamic Armed Forces
BOL	Bangsamoro Organic Law
BTA	Bangsamoro Transition Authority
FAB	Framework Agreement of Bangsamoro
FPA	Final Peace Agreement
ICG	International Crisis Group
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPST	Joint Peace and Security Teams
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MILF	Moro Islamic Liberation Front
MNLF	Moro National Liberation Front
OIC	Organization of Islamic Conference
SPCPD	Southern Philippines Council for Peace and Development
UNFAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations

UNYPAD United Youth for Peace and Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan berlangsung semenjak masa kolonialisme Spanyol dan Amerika yang berusaha untuk menguasai kelompok agama Islam. Moro yang menjalankan hukum Islam dinilai berbeda dengan sistem pemerintahan barat yang sekuler antara urusan politik dan agama. Diawali pada masa kolonialisme Bangsamoro selalu tersudutkan di wilayahnya sendiri. Kekerasan seringkali digunakan untuk mengekspresikan aspirasinya. Pemberontakan bersenjata yang diawali oleh Moro National Liberation Front (MNLF) untuk mendapatkan independen atas etno-religius Bangsamoro. MNLF berusaha untuk menekankan identitas Moro sebagai orang yang tidak terjajah dan menentang 'elit politik-ekonomi' Manila yang mendominasi Moro.¹

MNLF melakukan perjanjian damai Tripoli bersama dengan Pemerintah Filipina yang dimediasi oleh OIC.² Namun, perjanjian tersebut dinilai kurang berhasil karena tidak konsisten dan tidak jelas. Sehingga, ditunjuknya Nur Misuari sebagai Gubernur Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dan Ketua Dewan Perdamaian dan Pembangunan Filipina Selatan (SPCPD) melalui kesepakatan Final Peace Agreement (FPA) diharapkan dapat mencapai efektifnya Perjanjian Tripoli. Pada kenyataannya FPA tidak mampu menghentikan keinginan

¹ Aurel Croissant, Beate Martin, and Sascha Kneip, eds., *The Politics of Death : Political Violence in Southeast Asia* (Berlin ; Münster: Lit, 2006), 4.

² Croissant, Martin, and Kneip, eds., *The Politics of Death : Political Violence in Southeast Asia*, 5.

Moro untuk merdeka dari Filipina. Masih terdapat masalah-masalah yang belum terjawab dalam budaya, ekonomi dan politik. ARMM yang seharusnya sebagai jaminan untuk berjalannya otonomi Islam tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Moro yang selalu diabaikan oleh pemerintah Filipina menjadi jenuh dengan sikap pemerintah. Masyarakat Moro merasakan ketidakadilan atas kerangka sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kebencian dan permusuhan senjata yang dibiarkan berangsur-angsur berada tanpa ada penyelesaian yang tuntas. Ketimpangan struktur kekuasaan diperlukan keharmonisan kedua belah pihak yang selama ini tidak ada.³ Intensitas konflik masih tinggi dengan masih berdirinya kelompok-kelompok bersenjata.

Diskriminasi terhadap Bangsamoro menjadikan mereka ingin untuk memerdekakan diri dari Filipina. Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang awalnya merupakan bagian dari MNLF yang kemudian menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya otonomi Islam di Filipina Selatan.⁴ MILF memiliki tujuan pemisahan diri dan mencapai negara Islam atas Bangsamoro. MILF yang mampu meningkatkan kekuatan pasukannya dan memperluas teritorinya terus memperpanjang konflik antara Pemerintahan Filipina dan Filipina Selatan. Kurangnya komitmen pemerintah dan MNLF dalam melaksanakan ARMM menjadikan MILF semakin brutal. Berbagai jurnal ilmiah dan buku berulang kali

³ Ikhwan Rahmatika Latif, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi, "The Quality of Peace in Post-Conflict Situation: A Comparative Study between Armed Conflicts in Aceh and Bangsamoro," *Global: Jurnal Politik Internasional* 22, no. 2 (December 31, 2021): 223, <https://doi.org/10.7454/global.v22i2.430>.

⁴ Candice Malan and Hussein Solomon, "Between Conflict and Compromise in the Philippines," *Indian Journal of Asian Affairs* 25, no. 1/2 (2012): 60, <http://www.jstor.org/stable/41950521>.

menegaskan sikap diskriminatif dan marjinalisasi yang dirasakan oleh masyarakat Moro yang terus membuat konflik ini terus berlarut-larut. Tuntutan pemisahan diri Moro tidak hanya semata prasangka buruk antar etno-religius dan konflik sumber daya.

Agenda politik untuk mendirikan negara Islam yang independen pun kemudian bergeser dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan Bangsamoro. Presiden Filipina, Benigno Aquino III, menggunakan pendekatan perdamaian dengan solusi yang lebih lunak. MILF pun kemudian mencoba solusi untuk negosiasi damai dengan pemerintah yang merupakan bukti bahwa tujuan sebagai negara independen telah berubah.⁵ Usaha mediasi antara pemerintah Filipina dan MILF kemudian dilakukan oleh beberapa aktor internasional seperti Malaysia. Mediasi dan negosiasi ini bertujuan untuk menahan kekerasan yang terjadi akibat dari konflik dan mencari jalan tengah untuk mengatasi konflik. Malaysia menjadi aktor netral yang tidak memihak pada pihak manapun. Perjanjian damai harus meliputi poin-poin yang dapat menguntungkan semua pihak. Bersamaan dengan International Monitoring Team (IMT) yang terdiri atas Malaysia, Libya, Brunei, Jepang, Norwegia, Uni Eropa, dan International Contact Group (ICG) yang berperan untuk memonitor serta menjaga situasi kondusif untuk mencapai perdamaian di Filipina Selatan.⁶

⁵ Santos Jr et al., *Primed and Purposeful : Armed Groups and Human Security Efforts in the Philippines* (Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute Of International And Development Studies, 2010), 77.

⁶ John Lee Candelaria, "Mediating Civil Conflicts in Southeast Asia: Lessons from Aceh and Mindanao," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 8, no. 2 (December 8, 2020): 111–27, <https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6622>.

Bercermin pada perjanjian sebelumnya pada perjanjian sebelumnya, MILF dan Pemerintah Filipina dapat merumuskan masalah apa saja yang perlu dijawab. Kerangka kerja Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) pun ditandatangani oleh Pemerintah Filipina dan MILF dengan salah satu poin utama memberikan otonomi khusus pada Bangsamoro yang akan mengganti ARMM. RUU Dasar Bangsamoro dengan menggunakan dasar syariah pun disusun oleh Komisi Transisi Bangsamoro untuk membentuk entitas politik dan pemerintahan Bangsamoro yang akan menjaga hak individu dan kolektif. Kerangka perjanjian ini menjadikan Bangsamoro dapat menentukan nasib sendiri dimana yang selama ini menjadi salah satu harapan yang ingin dicapai.

Hak-hak masyarakat Moro yang selama ini terabaikan dapat dipenuhi. Setelah proses perdamaian dan negosiasi antara Pemerintahan Filipina dan MILF, pada 2014 mencapai finalisasi perjanjian yaitu Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak berkonflik. Pembagian kekuasaan dan pembentukan ulang otonomi Bangsamoro menjadi poin penting dalam perjanjian perdamaian ini. Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) dapat dinonaktifkan dan separatisme yang menggunakan senjata pun berhasil dihentikan. Selama proses perdamaian ini selain meliputi komunitas internasional terdapat dukungan dari lokal, nasional dan masyarakat sipil.⁷

CAB diharapkan dapat menghentikan konflik kekerasan Bangsamoro dan mempromosikan perdamaian. Pemerintah mengakui aspirasi Bangsamoro yang

⁷ GPH Peace Panel and MILF Peace Panel, "The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro," United Nations Peacemaker Document Retrieval, accessed November 20, 2021, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PH_140327_ComprehensiveAgreementBangsamoro.pdf.

selama ini dituntut oleh masyarakat Moro melalui demokrasi atas validasi identitas mereka. Pemerintahan mandiri yang menggantikan ARMM memberikan peluang untuk masyarakat Moro hidup layaknya manusia dengan hak-hak mereka untuk hidup tanpa terintimidasi oleh pihak manapun.

Komitmen yang diberikan pihak berkonflik untuk melindungi dan meningkatkan hak masyarakat Bangsamoro dengan mengurangi kesenjangan, ketidakadilan sejarah, ketidaksetaraan budaya melalui CAB yang telah disepakati.⁸ Perjanjian konflik ini sebagai solusi permusuhan bersenjata antara dengan memberikan kehormatan, keadilan, dan martabat. Keadilan yang diperoleh dengan menghormati dan mengakui perbedaan identitas. Mengakui dan menghormati satu sama lain akan membentuk kepercayaan meski ada perbedaan dari agama, identitas, maupun etnis. Menanggapi perbedaan dengan damai tanpa ada senjata memberikan rasa aman pada masyarakat Filipina secara keseluruhan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

MILF dan Pemerintah Filipina bersedia untuk melakukan proses perdamaian melalui FAB. Formula baru yang disajikan dimana Moro dapat menjadi independen tanpa lepas dari pemerintahan pusat pun membuka pintu terhadap dialog perdamaian. Bangsamoro menggantikan ARMM dan undang-undang yang akan meregulasi otonomi khusus Bangsamoro. Pemerintah memberikan pengakuan politik bagi kelompok untuk memiliki hak-haknya untuk hidup, berekspresi sesuai

⁸ GPH Peace Panel and MILF Peace Panel, "The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro."

dengan agama dan keyakinan, kebebasan berbicara, mengekspresikan pendapat politik, kebebasan tempat tinggal, bebas dari segala bentuk pelecehan agama dan etnis, dan hak untuk masyarakat adat yang harus dihormati.

Diskriminasi dan stigma negatif yang selalu terikat kepada masyarakat Moro pun bisa terlepas melalui pengakuan entitas Bangsamoro. Kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dimana pemerintah dapat mempertahankan status quo dan masyarakat moro yang dapat memiliki wewenang terhadap kelompok etnis dan wilayahnya. Namun, implementasi dan normalisasi pun harus segera diterapkan untuk mengurangi dan mengendalikan senjata berlebih adanya keberadaan kelompok pemberontak lainnya di luar MILF. Negosiasi dan perjanjian damai CAB pun dinilai berhasil karena mampu untuk menghentikan konflik bersenjata yang mematikan di Filipina. CAB yang belajar dari perjanjian-perjanjian damai terdahulu dan juga otonomi daerah ARMM yang ambigu.

Perjanjian komprehensif berisikan pembentukan kerangka kerja yang luas. CAB diharapkan untuk memberikan akhir konflik bersenjata yang berkepanjangan untuk mendapatkan hak penentuan nasib diri sendiri dan teritorial jangka panjang. Transisi dari konflik bersenjata ke perdamaian tidaklah semudah membalik telapak tangan. Menyadari bahwa perdamaian memerlukan sebuah proses yang dilakukan pemerintah pada seluruh lapisan masyarakat menggunakan proyek dari berbagai segi. Pada artikel jurnal oleh Ronli Sifris dan Maria Tanyag, disebutkan bahwa ketidak amanan dari konflik bersenjata di Filipina Selatan yang berlarut-larut ini

sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.⁹ Konflik menurut Lederach seringkali berkaitan seringkali disebabkan oleh kegagalan struktur pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan mendasar, memberikan ruang untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat.¹⁰

Perjanjian damai sejatinya tidak akan mendatangkan perdamaian secara instan sehingga membutuhkan komitmen untuk menerapkannya. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) terbentuk pada pemerintahan Rodrigo Duterte. Proses perdamaian dari penandatanganan CAB hingga terbentuknya BARMM berjalan dengan lancar. Pada Joint Statement yang diadakan di Malaysia, para pihak menegaskan komitmen mereka untuk normalisasi implementasi CAB yang sebagian besar difokuskan pada transformasi para pejuang MILF, keluarga, dan komunitas hingga menghasilkan Exit Agreement.¹¹ Beberapa perjanjian pun ditandatangani sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat dan mempertahankan hasil proses perdamaian Bangsamoro. Dalam proses normalisasi ini MILF dan Pemerintah Filipina menyadari pentingnya aspek transisi keadilan dan rekonsiliasi untuk menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Keberhasilan ratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL) dan Bangsamoro Transition Authority

⁹ Ronli Sifris and Maria Tanyag, "Intersectionality, Transitional Justice, and the Case of Internally Displaced Moro Women in the Philippines," *Human Rights Quarterly* 41, no. 2 (2019): 406, <https://doi.org/10.1353/hrq.2019.0031>.

¹⁰ Ronli Sifris and Maria Tanyag, "Intersectionality, Transitional Justice, and the Case of Internally Displaced Moro Women in the Philippines," *Human Rights Quarterly* 41, no. 2 (2019): 406, <https://doi.org/10.1353/hrq.2019.0031>.

¹¹ Office of Presidential Adviser on the Peace Process, "GPH, MILF Implementing Panels Reaffirm Commitment for the Full Implementation of the CAB," PeaceGovPH, accessed December 21, 2022, <https://peace.gov.ph/2019/04/gph-milf-implementing-panels-reaffirm-commitment-for-the-full-implementation-of-the-cab/>

(BTA) di otonomi Bangsamoro juga menandakan kemajuan yang signifikan dari implementasi CAB. Komitmen nyata Duterte dalam proses perdamaian Bangsamoro bukan lagi hanya janji semata. Duterte memberikan Bangsamoro keleluasaan untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat dan penentuan nasib sendiri untuk prospek kemajuan nyata dan pembangunan.

Konflik dan kekerasan antara MILF dan Pemerintah Filipina memang sudah berakhir. Perlu diingat kembali bahwa prasangka antar etnis dan agama yang merupakan hasil dari konflik yang berangsur-angsur tidak mengartikan akan langsung hilang begitu saja melalui perjanjian damai ini. Agenda politik atas negara independen Moro yang selama ini ada tidak hanya bersoal tentang ekonomi, sumber daya, dan perang etnoreligius.¹² Konflik kekerasan merupakan manifestasi historis dari sentralisme dan perampasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Moro.

Perdamaian tidak akan langsung tercapai pada perjanjian ataupun negosiasi melainkan memerlukan peacebuilding yang dapat mencakup, menghasilkan, dan menopang rangkaian proses, pendekatan, dan tahapan untuk mengubah konflik menuju hubungan yang lebih berkelanjutan dan damai. Setelah perjanjian CAB pun masih terdapat keraguan Kristen Filipina atas otonomi Bangsamoro yang tidak akan mengkhianati dan memiliki akses untuk bertindak ekstrim. Terdapat pula sikap-sikap ekstrimisme dimana beberapa kelompok memiliki hubungan dengan teroris

¹² Croissant, Martin, and Kneip, eds., *The Politics of Death : Political Violence in Southeast Asia*, 1-2.

seperti ASG dengan ISIS.¹³ Perdamaian seharusnya menghilangkan minat untuk melakukan kekerasan dan kembali lagi ke kondisi berkonflik. hak-hak masyarakat Moro memang telah dijanjikan di CAB, tetapi penerapannya masih jauh dari sempurna dan terdapat penundaan. Kelompok radikal seperti Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) dan Kelompok Maute, dipicu oleh penundaan penerapan perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani.¹⁴ Faksi-faksi pecahan dari MNLF atau MILF pun masih aktif di wilayah otonomi daerah BARMM.¹⁵ Keinginan untuk mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan. Ekstrimisme didukung dengan kerentanan kaum muda terhadap radikalisme. Sehingga dengan menggunakan instrumen pemerintah dan MILF saja tidak cukup untuk memberantas konflik dan kekerasan karena tidak adanya kontra-narasi yang efektif dan kebijakan negara yang relevan.

Berbagai pihak-pihak yang dirugikan saat terjadinya konflik seperti perempuan yang menjadi kelompok yang termarginalisasi. Kontribusi organisasi-organisasi asing, nasional, dan lokal yang membantu dalam proses perdamaian pun dicantumkan di dalam CAB. Masyarakat madani secara aktif dan sukarena terlibat langsung dalam proses perdamaian.

Permasalahan ini nyata terjadi pada Moro sebagai kelompok yang menjadi korban dari kegagalan struktur pemerintahan Filipina. Sehingga diperlukan tekad

¹³ Trajano Julius Cesar, "Bottom-up Peacebuilding: Role of Grassroots and Local Actors in the Mindanao Peace Process," *Asian Journal of Peacebuilding* 8, no. 2 (November 30, 2020): 359, <https://doi.org/10.18588/202011.00a097>.

¹⁴ Cesar, "Bottom-up Peacebuilding: Role of Grassroots and Local Actors in the Mindanao Peace Process," 359.

¹⁵ Mimmi Söderberg Kovacs, Kristine Höglund, and Mélida Jiménez, "Autonomous Peace? The Bangsamoro Region in the Philippines beyond the 2014 Agreement," *Journal of Peacebuilding & Development* 16, no. 1 (January 24, 2021): 63, <https://doi.org/10.1177/1542316620987556>.

kuat pemerintah mengambil langkah awal untuk melakukan perubahan dan tatanan negara yang benar-benar baru dan lebih stabil. Namun, hanya mengandalkan pemerintah dan MILF sebagai aktor tunggal perdamaian akan sulit mendapatkan perdamaian yang sesungguhnya. Dibutuhkan aktor multi-dimensi untuk terlibat mengatasi dampak negatif dari konflik identitas melalui program peace building. Kenyataannya bahwa setelah berbagai negosiasi perdamaian dan perjanjian damai masih terdapat pertanyaan mengapa masih perdamaian tetap sulit dicapai dan kekerasan yang masih ada meski setelah penandatanganan CAB dan memilih untuk mengikuti daerah otonom BARMM.¹⁶

Setelah penandatanganan CAB maupun berdirinya entitas politik BARMM secara resmi pun keterlibatan organisasi dan masyarakat sipil tidak dapat dipungkiri masih berjalan. Terdapat isu-isu yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah dan masih ada setelah perjanjian damai seperti perang antar klan (rido), kelompok kriminal, elit politik, dan ekstrimisme. Rido atas sengketa tanah kenyataannya masih ada di kehidupan sehari-hari dan merugikan di mana ribuan penduduk harus mengungsi.¹⁷ Usaha perdamaian oleh masyarakat sipil dan LSM yang meliputi banyak individu dan aktor bukanlah hal yang baru. Keterlibatan sekolah pada akar rumput mampu menghilangkan propaganda kekerasan secara perlahan tapi pasti. Kontribusi aktor internasional seperti JICA yang bekerjasama dengan BDA untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga mempengaruhi proses perdamaian. Konflik kekerasan yang terjadi di Filipina Selatan tidak dapat disimpulkan hanya

¹⁶ Cesar, "Bottom-up Peacebuilding: Role of Grassroots and Local Actors in the Mindanao Peace Process," 363.

¹⁷ Cesar, "Bottom-up Peacebuilding: Role of Grassroots and Local Actors in the Mindanao Peace Process," 363.

MILF dan pemerintah Filipina sebagai penyebabnya. Perjanjian level nasional tidak menyeluruh ke situasi kekerasan sehari-hari yang terjadi yang mengganggu keamanan masyarakat. Sehingga aktor-aktor yang dapat menjangkau masyarakat dan mengerti kekerasan apa yang terjadi dan bagaimana penindakannya.

1.2.2 Pembatasan masalah

Usaha-usaha yang pernah dilakukan saat masih berjalannya konflik bersenjata terdapat kemauan pemerintah serta rakyatnya untuk mencapai sebuah perdamaian. Berangkat dari keterlibatan dan perdamaian yang terkolaborasi oleh berbagai aktor, penelitian menjadi usaha pada top leadership, middle, serta grassroot perdamaian yang berkelanjutan. Filipina dalam upayanya untuk membangun dan mencapai sebuah perdamaian meskipun memerlukan sebuah proses yang panjang. Proses perdamaian yang dimaksud adalah seseorang harus memahami siapa yang bertindak di setiap level, dan tindakan apa yang harus diambil di setiap level. Dalam kajian ini akan membahas faktor-faktor konflik dapat muncul serta bagaimana para aktor mengidentifikasi masalah yang terjadi dan melakukan sebuah peacebuilding dalam tingkatannya. Peneliti akan mengerucutkan pembahasan pada Bangsamoro sebagai pihak yang terdiskriminasi dan rawan berkonflik. Pemerintah Filipina MILF, BDA, dan Masyarakat sipil yang mencakup LSM lokal dan sekolah akan menjadi aktor dalam penelitian pembangunan perdamaian Bangsamoro. Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian Comprehensive Agreement on the Bangsamoro pada tahun 2014, proses perdamaian yang berkelanjutan dimulai. Penelitian ini akan membahas setelah

ditandatanganinya CAB pada era Benigno Aquino hingga berakhirnya periode kepresidenan Duterte tahun 2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang dilanjutkan dengan identifikasi mengenai persoalan peacebuilding pada kaum minoritas Bangsamoro di Filipina maka pertanyaan utama di dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pembangunan perdamaian Bangsamoro pasca Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tahun 2014-2022?” Secara lebih rinci pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah studi Pemerintah Filipina, MILF, Bangsamoro Development Agency, JICA, UNFAO, dan Kekuatan Masyarakat yang terlibat pada peacebuilding Bangsamoro.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa proses untuk mewujudkan perdamaian kelompok etno-religius Bangsamoro serta dalam upayanya menangani konflik dan kekerasan etno religius yang masih tersisa setelah perjanjian damai. Dengan menggunakan Peacebuilding yang diajukan oleh Lederach mengenai piramida sebagai teori, ini berguna untuk mengerti sebuah perdamaian tidak serta-merta berakhir dari perjanjian damai Comprehensive Agreement on the Bangsamoro saja, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Penelitian ini pun akan memperlihatkan

bahwa dalam situasi masyarakat yang terpecah, *middle-range* dan akar rumput memiliki potensi dalam mengkonstruksi perdamaian dalam masyarakat yang berkonflik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan dapat berguna untuk konflik intra negara lainnya yang menghadapi isu identitas seperti Bangsamoro. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini tidak hanya dapat memberikan pengetahuan terhadap penulis saja tetapi pada masyarakat luas. Mengingat bahwa konflik merupakan suatu hal yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari dapat memberikan pencerahan dalam mengatasi sebuah konflik melalui penyelesaian akar masalah dan mencapai perdamaian secara berkelanjutan. Melalui penelitian Peacebuilding dari berbagai level dalam masyarakat untuk mentransformasi konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, serta dapat pula menjadi refleksi atau pembelajaran bagi negara yang masih memiliki konflik identitas.

1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelitian yang valid peneliti mengkaji empat literatur sebagai pendukung.

Pada literatur pertama, *The Bangsamoro Peace Process and Peacebuilding in Mindanao: Implications to Philippine Studies and National Development* oleh Juvanni A. Caballero, Moro merupakan bagian dari Filipina dan permasalahan yang

bahwa dalam situasi masyarakat yang terpecah, *middle-range* dan akar rumput memiliki potensi dalam mengkonstruksi perdamaian dalam masyarakat yang berkonflik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan dapat berguna untuk konflik intra negara lainnya yang menghadapi isu identitas seperti Bangsamoro. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini tidak hanya dapat memberikan pengetahuan terhadap penulis saja tetapi pada masyarakat luas. Mengingat bahwa konflik merupakan suatu hal yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari dapat memberikan pencerahan dalam mengatasi sebuah konflik melalui penyelesaian akar masalah dan mencapai perdamaian secara berkelanjutan. Melalui penelitian Peacebuilding dari berbagai level dalam masyarakat untuk mentransformasi konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, serta dapat pula menjadi refleksi atau pembelajaran bagi negara yang masih memiliki konflik identitas.

1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan penelitian yang valid peneliti mengkaji empat literatur sebagai pendukung.

Pada literatur pertama, *The Bangsamoro Peace Process and Peacebuilding in Mindanao: Implications to Philippine Studies and National Development* oleh Juvanni A. Caballero, Moro merupakan bagian dari Filipina dan permasalahan yang

terjadi pada Bangsamoro memerlukan usaha bersama oleh komunitas akar rumput dan entitas internasional. Caballero menganalisa bahwa proses perdamaian Bangsamoro harus memecahkan prasangka, ketidakpercayaan, dan perlawanan yang mengakar antar masyarakat terlebih dengan sikap bias Kristen Filipina yang meragukan sistem otonomi di Filipina Selatan.¹⁸ Caballero mengungkapkan dengan mengesampingkan kecurigaan dan menguatkan kepercayaan dapat membantu proses perdamaian yang selama ini diharapkan. Caballero mengutarakan seharusnya untuk lebih banyak peneliti yang membahas mengenai proses perdamaian Bangsamoro melalui dua jalur yaitu pemerintah Filipina-MILF dan pada level *grassroot*.¹⁹ Isu-isu apa yang masih berpengaruh pada proses perdamaian dan topik yang muncul seiring perkembangan *peace talk* pun menjadi bahasan yang penting untuk membantu bina damai di Filipina.

Ini menjelaskan keinginan Caballero untuk memperbanyak studi pada permasalahan dan perkembangan yang terjadi diantara Moro dan non-Moro menggunakan lensa damai. Selain penelitian, Caballero juga mengungkapkan perlunya pengaplikasian proses perdamaian. Kontribusi perdamaian tidak hanya dalam berbentuk penelitian saja melainkan penerapan secara *real-time* sesuai dengan kondisi yang ada. Solusi yang konstruktif baik vertikal maupun horizontal dapat menjadi bahasan untuk penelitian yang dapat membantu mengatasi permasalahan di Mindanao.

¹⁸ Juvanni A. Caballero and Mark Anthony J. Torres, "The Bangsamoro Peace Process and Peacebuilding in Mindanao: Implications to Philippine Studies and National Development," *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences* 19, no. 3 (October 2016): 30, <https://doi.org/10.5782/2223-2621.2016.19.3.29>.

¹⁹ Caballero and Torres, "The Bangsamoro Peace Process and Peacebuilding in Mindanao: Implications to Philippine Studies and National Development," 34.

Pada buku *Forging Sustainable Peace in Mindanao: The Role of Civil Society* oleh Steven Rood, berlatar belakang sebelum MILF dan pemerintahan Filipina mencapai perjanjian damai. Rood berpendapat bahwa masyarakat sipil memiliki potensi memberikan kontribusi untuk perdamaian yang berkelanjutan dan mengelola gerakan separatisme. Konflik kekerasan di Filipina Selatan tidak hanya bersoal mengenai separatisme melainkan masalah-masalah seperti penculikan, konflik antar klan dan aktivitas komunisme.²⁰ Rood berargumen dengan melibatkan masyarakat sipil dapat memperoleh perdamaian yang berkelanjutan. Ini disebabkan aktifnya masyarakat madani dalam mengatur akar permasalahan dan mendirikan konstituen yang diperlukan untuk *peace agreement*.²¹ Rood menyajikan data-data yang berguna untuk membuktikan konflik kekerasan yang berlangsung. Seringkali konflik antar klan menimbulkan konflik etnis dan keterlibatan militer sehingga ini perlu ditangani oleh komunitas lokal.

Rood berpendapat perpecahan-perpecahan tertentu tidak dapat diselesaikan melalui panel perdamaian pemerintah Filipina dan MILF di meja perdamaian saja. Masyarakat sipil dapat meningkatkan peluang terhadap perdamaian yang abadi. Asosiasi bisnis pun ikut berkontribusi dalam membangun kepercayaan antar komunitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Tetapi, dalam literatur ini juga dijabarkan adanya kelemahan masyarakat sipil seperti kurangnya LSM berbasis Islam dan donor yang seharusnya digunakan untuk prospek perdamaian disalurkan

²⁰ Rood and Alagappa, *Forging Sustainable Peace in Mindanao: The Role of Civil Society*, 4.

²¹ Rood and Alagappa, *Forging Sustainable Peace in Mindanao: The Role of Civil Society*, 2.

pada kepentingan ekonomi. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki organisasi dan masyarakat sipil perlu dilengkapi oleh pemerintah.

Pada Literatur terakhir, *Solving the Moro Problem: legalizing the Bangsamoro peace process* oleh Gene Carolan menggunakan teori legalisasi dalam menganalisa proses perdamaian di Filipina. Carolan menganggap bahwa kestabilan CAB dikarenakan fitur hukum dalam mempertahankan proses perdamaian jangka panjang. CAB merupakan legalisasi yang keras sehingga mendukung kepastian hukum jauh lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan memiliki presisi tinggi.²²

CAB merupakan hasil dari pembelajaran dari pengalaman konflik yang sudah berjalan selama kurang lebih empat puluh tahun dan *peace process* yang telah berhasil di belahan dunia lain. Carolan juga menekankan bagaimana CAB secara eksplisit menangani isu konflik di Mindanao yaitu kepemilikan tanah, agama, dan hubungan antara Moro, Kristen, dan Lumads yang merupakan masyarakat Filipina. MILF dan pemerintah Filipina menggunakan terbuka, terstruktur, dan inklusif untuk mengakhiri konflik dibandingkan negosiasi eksklusif yang memiliki tendensi menghasilkan perdamaian yang serampangan seperti Perjanjian Tripoli. Tripoli yang menunda penyelesaian beberapa masalah dan tidak adanya persyaratan yang tepat kemudian mengorbankan bina damai jangka panjang karena celah-celah yang dihasilkan.²³ Literatur ini bertumpu pada legalisasi sebagai instrumen untuk mengatasi isu-isu yang dianggap menjadi dasar dari konflik. Legalisasi yang keras

²² Gene Carolan, "Solving the Moro Problem: Legalizing the Bangsamoro Peace Process," *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 8, no. 3 (July 11, 2016), <https://doi.org/10.1108/jacpr-02-2016-0214>.

²³ Carolan, "Solving the Moro Problem: Legalizing the Bangsamoro Peace Process."

dapat memberikan proses perdamaian dan kesepakatan yang positif antara pihak berkonflik.

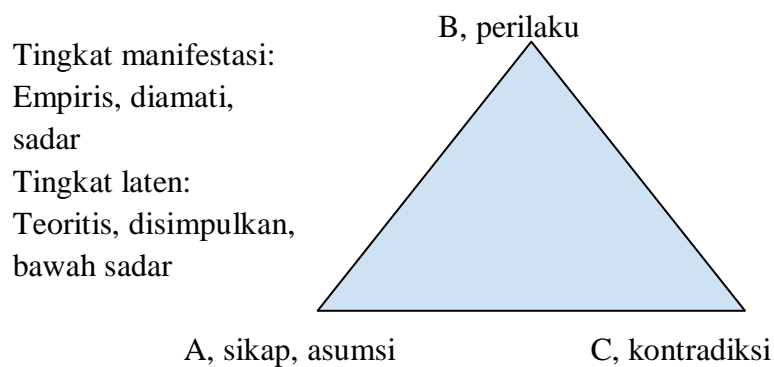
Namun, perjanjian yang didefinisikan secara eksplisit juga memiliki sisi yang tidak luwes sedangkan dalam bina damai memerlukan kesepakatan yang mencakup proses perdamaian jangka pendek dan jangka panjang.²⁴ Carolan pun menyimpulkan penyebab kekerasan mungkin masih berjalan di Mindanao meskipun kesepakatan dilaksanakan. Tetapi, CAB yang tidak menggunakan unilateralisme dan bersifat inklusif membentuk komitmen solusi damai.

Pada literatur Carolan, CAB berfungsi sebagai fitur hukum yang dapat menunjang peacebuilding Bangsamoro. Melalui dua literatur oleh Caballero dan Rood memiliki kesamaan dimana permasalahan Bangsamoro dapat diselesaikan melalui paradigma yang melibatkan masyarakat sipil. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sebenarnya berguna untuk membangun perdamaian. Namun, pada ketiga literatur tersebut tidak dimeneliti bagaimana pengaruh *middle-level* seperti LSM dan Pemimpin dari berbagai sektor. Aktor *middle-level* berguna untuk menciptakan perdamaian yang terkolaboratif di Filipina. Interaksi antar level ini justru saling melengkapi kekurangan masing-masing pihak sehingga skripsi ini berfokus pada bina damai Moro yang melibatkan aktor dari berbagai level.

1.5 Kerangka Pemikiran

²⁴ Carolan, "Solving the Moro Problem: Legalizing the Bangsamoro Peace Process."

Konflik menurut Johan Galtung merupakan hal yang berbeda dengan kekerasan. Konflik selalu memiliki ketidaksesuaian atau kontradiksi terhadap tujuan. Galtung merumuskan konflik adalah konstruksi triadik yang terdiri dari tiga elemen yaitu, A (attitudes) + B (behaviour) + C (contradiction).²⁵



Gambar 1.1 Galtung's The Conflict Triangle (Galtung's 1996)

Sikap atau tingkah laku (a) dan kontradiksi (c) berada di tingkat laten yang tidak terlihat, sedangkan perilaku (b) merupakan tingkat manifestasi yang dapat dirasakan secara langsung.²⁶ Segitiga konflik ini dapat menjadi alat untuk mengatasi akar konflik dan memungkinkan untuk mengubah sifat dialektika konflik. Melalui segitiga ini dapat melacak dan mengidentifikasi aliran di semua enam arah yang dapat dimulai dari segala arah. Segitiga Galtung berguna sebagai alat konseptual untuk menilai kerentanan utama dari proses perdamaian Bangsamoro dengan mengidentifikasi hubungan dinamis antara sisa masalah, perilaku, dan sikap di mana perdamaian paling berisiko.²⁷ Kontradiksi dapat

²⁵ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization* (Oslo Los Angeles Prio Sage, 1996), 71.

²⁶ Galtung, *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*, 71.

²⁷ Kovacs, Höglund, and Jiménez, "Autonomous Peace? The Bangsamoro Region in the Philippines beyond the 2014 Agreement," 56.

dialami sebagai frustrasi akibat tujuan diblokir oleh sesuatu, memicu agresi sebagai sikap dan agresi sebagai perilaku.²⁸ CAB dan BARMM berpotensi untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata tetapi dapat meningkatkan kekerasan jika gagal memberikan keuntungan perdamaian.

Untuk memahami perdamaian, Galtung menggunakan konsep kekerasan untuk penelitian yang logis dan bukan berisi daftar-daftar yang tidak diinginkan. Kekerasan hadir ketika manusia dipengaruhi sehingga realisasi somatik dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensinya.²⁹ Galtung membedakan kekerasan personal dan struktural sebagai dasar untuk memahami tidak adanya kekerasan. Kekerasan personal merujuk pada konsekuensi yang dapat ditelusuri kembali pada pelaku dan berfluktuasi. Sedangkan kekerasan struktural dimana kekerasan dibangun ke dalam struktur dan muncul sebagai kekuatan yang tidak setara dan akibatnya kesempatan hidup yang tidak setara dan merugikan orang lain dalam struktur tersebut secara stabil.³⁰

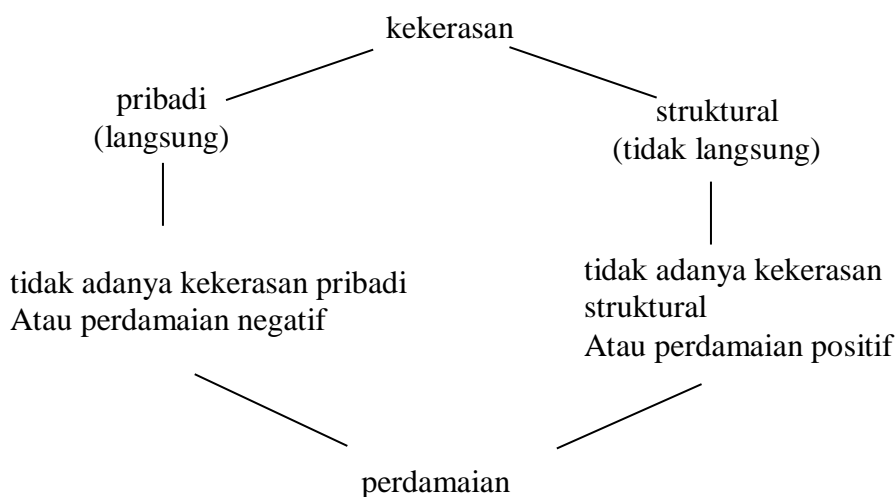
Sama seperti Galtung, Barash dan Webel menjelaskan kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan kultural bersumber dari ideologi, pengetahuan, seni, serta agama dalam bentuk prasangka. Kekerasan tidak hanya sesuatu yang dapat terlihat secara fisik tetapi terdapat pula kekerasan yang tidak terlihat. Kekerasan langsung umumnya bekerja lebih cepat dan lebih terlihat sehingga terluput oleh berita yang tidak dapat disangkal seperti perang, terorisme, dan tindakan represi domestik. Kekerasan struktural dan budaya ini biasanya ditemukan dalam institusi sosial,

²⁸ Galtung, *Peace by Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*, 72.

²⁹ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91, <https://www.jstor.org/stable/422690>.

³⁰ Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research."

budaya, dan ekonomi.³¹ Kekerasan struktural berdampak pada pengabaian hak-hak penting masyarakat, seperti kesejahteraan ekonomi, kesetaraan sosial, politik, dan seksual, rasa pemenuhan pribadi dan harga diri, dan sejenisnya. Kekerasan struktural berbentuk penindasan atau perlakuan buruk yang tersebar luas, menyakitkan, dan seringkali tidak diakui. Kekerasan kultural merupakan lanjutan dari kekerasan struktural untuk melegitimasi kekerasan dalam bentuk langsung atau strukturalnya.³² Kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat Moro menjadi manifestasi dari konflik antara MILF dan Pemerintah Filipina.



Gambar 1.2 Galtung's Concepts of Violence and Peace (Galtung's 1969)

Melalui figur yang disajikan oleh Galtung, perbedaan antara kekerasan pribadi dan struktural adalah kekerasan yang menimpa manusia secara langsung dari tindakan orang lain, dan kekerasan yang menimpa mereka secara tidak langsung karena struktur represif oleh tindakan manusia yang diringkas dan

³¹ David P Barash and Charles P Webel, *Peace and Conflict Studies* (Los Angeles, Calif. [U.A.] Sage [20]10, n.d.).

³² Barash and Webel, *Peace and Conflict Studies*.

bersama.³³ Dinamika konflik etnis yang diajukan oleh Stephen Ryan dimana konflik kelompok etnis terlibat pada kekerasan. Militerisasi, etnosentrisme yang dilebih-lebihkan, pemisahan fisik dan penajaman batas wilayah, berbagai proses yang terkait dengan jarak psikologis, pengudusan dan demonisasi, jebakan dan komitmen berlebihan, keterbelakangan ekonomi, dan rasa sinisme dan ketidakberdayaan dapat ditemukan setiap kali kelompok etnis terlibat dalam konflik kekerasan.³⁴

Johan Galtung menawarkan perdamaian memiliki dua sisi yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Beberapa peneliti pun ikut mengembangkan konsep perdamaian ini seperti David P. Barash dan Charles P. Webel. Perdamaian negatif mengacu pada tidak adanya kekerasan terorganisir langsung atau singkatnya tidak ada perang. Sedangkan perdamaian positif mengacu pada tidak adanya kekerasan langsung dan struktural. Perdamaian positif mengartikan kehadiran tatanan sosial yang adil dan keharmonisan. Perdamaian positif tidak hanya sebatas menyingkirkan kekerasan struktural atau ketidakadilan sosial, tetapi sekaligus mencakup ide mengimplikasikan keadilan sosial.

Peacebuilding merupakan sebuah proses yang tentunya mengatasi akar dari konflik untuk mencapai dan memelihara perdamaian dalam jangka panjang. Untuk membangun sebuah perdamaian diperlukan komunikasi, negosiasi, dan mediasi yang berfungsi untuk menggantikan perang yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ini diperlukan dengan inisiatif pemerintah dan sipil

³³ Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research."

³⁴ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations* (Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., Usa: Dartmouth, 1995), 78-79.

menerima perbedaan yang ada. Boutros-Ghali selaku mantan Sekretaris Jenderal PBB mendefinisikan peacebuilding sebagai, “*action to identify and support structures which will tend to strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict.*” Dengan mengetahui permasalahan yang mendasar secara kompleks dapat menghindari pengulangan konflik. Hal ini seringkali terlihat sepele namun tentu saja apabila sebuah masalah terus berulang berarti ada awal yang perlu dituntaskan. Proses perdamaian mengeluarkan diri dari konflik dan kesenjangan dari konflik yang berlangsung. Dengan demikian perdamaian harus menghilangkan alasan untuk tidak kembali kepada situasi konflik lagi dengan memenuhi kebutuhan dan hak manusia.³⁵

Peacebuilding Pyramid (Lederachian) merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh John Paul Lederach dalam jurnalnya *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Society* dimana perdamaian dicapai melalui proses dan bukan melalui sebuah peristiwa. Pada kasus Bangsamoro, MILF dan pemerintah pusat sudah bertekad untuk berdamai dengan memberikan otonomi dan kebebasan untuk memilih nasib sendiri melalui CAB. Namun, konflik dan kecurigaan yang dimiliki oleh ‘Kristen’ Filipina dan Bangsamoro tidak berhenti begitu saja dan memerlukan sebuah proses perdamaian. *Peacebuilding* merupakan strategi membalikkan proses destruktif yang menyertai kekerasan (seringkali memberi umpan untuk balik ke dalam situasi konflik).³⁶ Strategi ini melibatkan kontak antar-pihak yang lebih masif. Lederach menggunakan piramida untuk

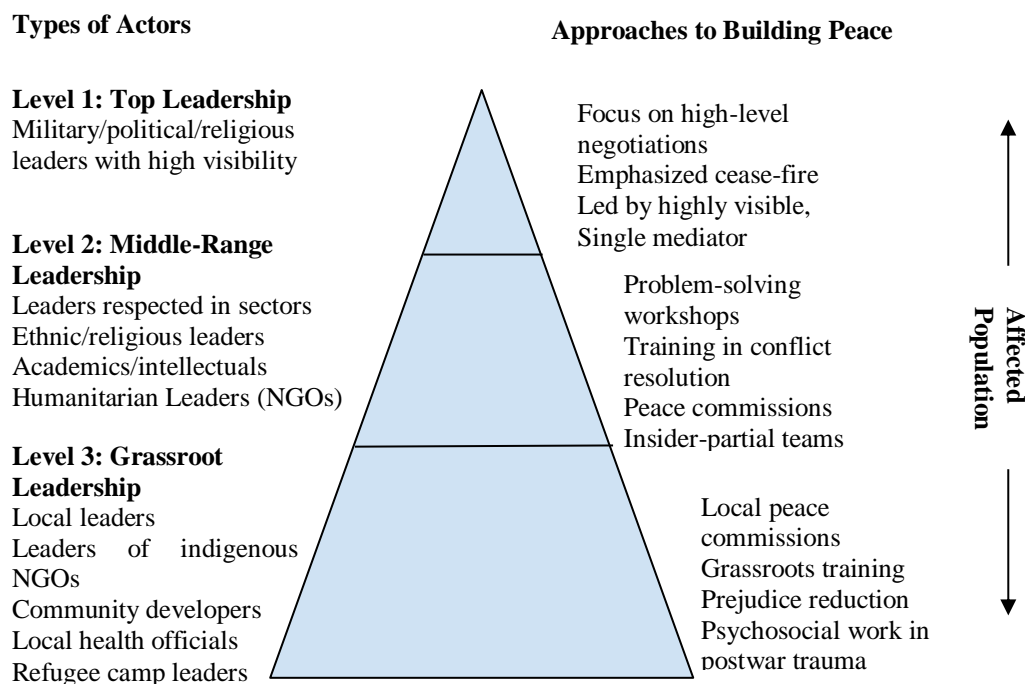
³⁵ Charles Webel and Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies* (London: Routledge, 2010), 160.

³⁶ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations* (Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., Usa: Dartmouth, 1995), 129.

melihat peran pemimpin dan aktor lainnya serta memungkinkan kita untuk meletakkan basis kepemimpinan ke dalam tiga kategori utama: top level yang mewakili beberapa orang saja, middle range, dan the grassroots yang mewakili hampir seluruh populasi pada umumnya.³⁷ *Peacebuilding* sebuah strategi untuk mentransformasi konflik dari bawah ke atas membangun jembatan antar masyarakat di Moro.

Piramida digunakan untuk menjabarkan proses yang menggambarkan bagaimana aktor, pendekatan, dan dampak dari perdamaian harus dibangun dalam populasi yang berkonflik. *Level of leadership* ini berfungsi sebagai lensa untuk melihat pada aktor dan aktivitas peacebuilding yang ditemukan dalam setiap tingkatnya secara lebih sederhana. Berikut adalah piramida yang dikemukakan oleh Lederach;

³⁷ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, 38.



Gambar 1.3 Lederach's Pyramid (Lederach's 1997)

Pada *top-level leadership*, diliputi oleh para pemimpin politik dan oposisi, agama, juga militer yang terlihat langsung oleh publik. Mereka merupakan aktor yang sering tersorot oleh publik dan media karena sebagai juru bicara atas kekhawatiran konflik serta cara mereka menemukan penyebab dan akan menyelesaikan konflik. Dikarenakan visibilitas yang tinggi, legitimasi yang didapatkan pun meningkat dan menjadi perwakilan bagi kelompok atau negara mereka. *Peacebuilding* pada tingkat ini lebih kepada proses pencapaian langkah demi langkah, berorientasi pada masalah, dan berjangka pendek.³⁸ Hal ini pun memberikan beban pada mereka karena perlu menahan tekanan dari musuh dan juga dari konstituennya. Segala tindakan yang dilakukan aktor pada level ini

³⁸ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, 40.

memiliki risiko yang besar untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Untuk mencapai perdamaian para pemimpin ini dianggap mempunyai kekuatan yang lebih besar karena membingkai isu dan proses maupun dalam pengambilan keputusan.

Level yang kedua ini merupakan aktor yang berfungsi dalam posisi situasi konflik yang berkepanjangan.³⁹ Namun aktor-aktor seperti pemimpin terhormat dari berbagai sektor (bisnis, pendidikan, kesehatan, dll), pemimpin kebudayaan, perwakilan keagamaan, akademisi, dan LSM tersebut posisinya tidak harus terhubung atau dikendalikan oleh aktor pada level pertama. Dengan mempertimbangkan aktor-aktor menengah tersebut dianggap dapat menghubungkan kelompok-kelompok yang terpecah sebab mereka memiliki hubungan pada *top-level leadership* serta *grassroots leadership*. Pada level ini aktor dapat ditemukan pada forum dialog, program penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjadi perantara hubungan antara pihak yang terlibat. *Gatekeepers* didefinisikan sebagai pemimpin lokal kelas menengah yang memegang kunci ke tiga gateway yang berbeda.⁴⁰ Pertama adalah gerbang antar-komunal yang ada di celah horizontal antara komunitas yang bersaing. Gerbang kedua adalah gerbang intra-komunal yang muncul dalam celah vertikal antara atas dan tingkat akar rumput dalam suatu masyarakat. Gerbang ketiga adalah gerbang *hybrid* yang muncul dalam celah diagonal antara aktor lokal dan internasional. Middle-range memiliki tiga fase tipologi yaitu pra-negosiasi, sewaktu negosiasi,

³⁹ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, 41.

⁴⁰ Uesugi, *Hybrid Peacebuilding in Asia*, 37.

dan pasca perjanjian. Aktor middle-range memfasilitasi penerapan perjanjian damai dan membantu untuk membangun hubungan baru antara dan di dalam musuh.

Mereka menjadi aset dan sumber solusi untuk menjalin hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Perbedaan antara *mid-space* dan *middle-range* adalah cakupan batas konseptual antara komunitas lokal dan internasional. Meskipun pada level ini aktornya bukan yang mendapatkan banyak sorotan publik, mereka memiliki kebebasan yang lebih besar dalam bergerak maupun bertindak. Mereka bergerak melintasi berbagai belahan dalam masyarakat untuk memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan yang bersaing. Selain itu mereka pun memiliki jaringan yang cukup luas sehingga pengaruh para aktor *middle-range level* ini yang menjadi komponen yang vital peacebuilding karena mereka mampu menghubungkan pihak-pihak lainnya untuk bisa bernegosiasi.

Pada level ketiga yaitu *grassroot leadership* disini adalah sosok yang mewakili massa atau seluruh komunitas.⁴¹ Gerakan kecil yang plural yang memberdayakan masyarakat biasa ini menjanjikan dibandingkan satu terobosan baru. Hal ini disebabkan melibatkan banyak orang sehingga mewakili suara masyarakat. Mereka terlibat langsung dalam *peacebuilding*, mengerti dan merasakan bagaimana konflik antara pemerintah pusat dan Bangsamoro ini berlangsung. Aktor dalam level ini biasanya pemimpin komunitas lokal, pemimpin LSM lokal, pemimpin profesional, pebisnis yang memiliki mentalitas untuk bertahan hidup.

⁴¹ Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, 42.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipilih adalah kualitatif yang menggunakan pemahaman dari penulis melalui data penelitian yang telah dikumpulkan untuk memberikan pengertian bagi pembaca dari topik penelitian. Metode yang digunakan pun interpretasi data deskriptif secara naratif.⁴² Penelitian yang deskriptif ini bersifat tekstual dan berfokus pada pemahaman terkait fenomena, aktivitas, dan proses sosial yang menghasilkan pemahaman baru. Interpretasi data dengan menggunakan pemikiran-pemikiran pada ahli untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah studi kepustakaan (sekunder) dengan melalui kumpulan jurnal, berita, dan artikel yang menyajikan konflik yang terjadi maupun pemaparan berita yang valid atas sebuah peristiwa yang bersangkutan dengan kasus ini.⁴³ Kemudian pernyataan aktor atau ahli pembangunan perdamaian pun akan menjadi penunjang argumen. Hal ini dapat diperoleh dokumen atau laporan resmi, maupun pidato yang diperoleh dari sang aktor perdamaian, saksi, dan/atau korban dari konflik (primer).⁴⁴

⁴² Alan Bryman, *Social Research Methods* (New York: Oxford University Press, 2013), diakses pada 20 Oktober 2022.

⁴³ Luigi Curini and Robert J Franzese, *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations* (Los Angeles: Sage, 2020), 339.

⁴⁴ Curini and Franzese, *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations*, 339-340

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan ini pembahasan terkait Pembangunan Perdamaian Bangsamoro yang berkelanjutan akan terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan berisikan latar belakang masalah dari konflik identitas Bangsamoro serta mengidentifikasi masalah memaparkan anomali dari penelitian yang kemudian menciptakan Pertanyaan Penelitian serta Pembatasan Masalah. Tujuan dan Kegunaan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dan manfaat melalui penelitian ini. Kajian Literatur berguna untuk mendukung serta memberi masukan untuk memperkuat argumen penelitian. Kerangka Penelitian berisikan teori dan konsep untuk mengkoneksi satu variabel dengan variabel yang lainnya dan memudahkan penelitian untuk dipahami. Sedangkan Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan Sistematika Pembahasan memaparkan langkah dari penelitian.

Bab 2 Perdamaian, Konflik, dan Kekerasan di Tanah Mindanao akan membahas perdamaian di Filipina Selatan berdasarkan The Comprehensive Agreement on the Bangsamoro mengenai Pemerintah Filipina-MILF mengakhiri Konflik Bersenjata melalui CAB dan Kondisi Perdamaian Pasca Penandatanganan CAB. Kemudian, pada bab ini akan membahas residu dan pembaharuan konflik dan kekerasan di Filipina Setelah Penandatanganan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Era Pemerintahan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte akan membandingkan dua kepemimpinan yang berbeda dalam melakukan upaya perdamaian di Filipina termasuk Bangsamoro.

Bab 3 Membangun Perdamaian Bangsamoro membahas mengenai proses pembangunan perdamaian yang otentik di Mindanao sebagai tindak lanjut pasca penandatanganan perjanjian damai CAB. Bab ini meneliti secara deskripsi analitis pada komponen level elit, *middle-range*, dan akar rumput yang mengenai proses perdamaian pasca konflik. Pada sub-bab 3.1 akan membahas upaya MILF dan Pemerintah Filipina dalam Membangun Perdamaian Bangsamoro. Pada Sub-bab 3.2 membahas pemimpin *middle-level* Bangsamoro dalam membangun hubungan yang transformatif di Mindanao yang mencakup MILF sebagai aktor *hybrid middle-range* menangani celah vertikal dan horizontal serta Bangsamoro Development Agency (BDA) *gatekeepers* intervensi asing untuk menyokong perdamaian di Mindanao. Pada Sub-bab 3.3 Transformasi Konflik Menggunakan Kekuatan Rakyat (*People Power*). Penulis menggunakan konsep *Peacebuilding* Lederach, *Bottom-up Peace-building* dan *Conflict transformation*, dan *Hybrid Peacebuilding* untuk menganalisis bab ini. 3.4 Perdamaian Bangsamoro yang Terkolaboratif menyajikan tabel untuk menjelaskan interaksi dan peranan setiap aktor dalam melakukan transisi konflik menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Bab 4 Kesimpulan menyimpulkan inti jawaban sekaligus menutup dari penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Dalam bab ini pula akan penulis akan memberikan saran sebagai masukan dalam proses perdamaian.